

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1 Kota Banjarmasin

Daerah yang sekarang bernama Kota Banjarmasin ini dulunya merupakan Desa Oloh Masih yang kemudian berkembang menjadi Kampung Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Samudera, Putera Kerajaan Daha yang menjadi raja di wilayah ini. Sejak itu, berdirilah Kerajaan Banjar yang menaklukkan Muaran Baan dan menjadikan sungai sebagai jalur perdagangan. Tidak lama berselang, Kerajaan Banjar diserang Kerajaan Demak dari Jawa, tetapi Kerajaan Banjar memilih bersekutu setelah mau menerima ajaran Islam yang dibawakan oleh Kerajaan Demak. Setelah bersekutu, kedua kerajaan ini menyerang Kerajaan Daha dan menguasainya. Kejadian Kerajaan Demak datang dan mengajak Kerajaan Banjar dalam menerima Islam ini terjadi pada 24 September 1526 M atau 6 Zulhijjah 932 H dan Pangeran Samudera berganti nama menjadi Sultan Suriansyah. Peristiwa ini menjadi awal berdirinya Kota Banjarmasin.¹

Secara geografi, Kota Banjarmasin berada dekat Sungai Barito dan dibelah oleh dua Sungai Martapura. Sehingga menjadikan Kota Banjarmasin seakan-akan terbelah menjadi dua bagian. Wilayah Kota Banjarmasin

¹ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin* (blog), diakses 19 Januari 2024, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

merupakan kota atau kabupaten tersempit di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 98,46 km² atau hanya 0,26% dari luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan wilayah yang cukup sempit, tetapi Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan dan 52 kelurahan.² Dari segi demografi, per 2022, setidaknya Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk sebanyak 667.489 dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 167.928 penduduk.³

A.2 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin hadir sebagai wadah bermusyawarah demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya antar umat beragama. Sebagai salah satu pendamping Pemerintah Kota Banjarmasin, FKUB Kota Banjarmasin memiliki kegiatan rutin dan tidak rutin yang bersifat ada persoalan ataupun tidak ada persoalan, FKUB Kota Banjarmasin tetap mengadakan pertemuan karena mengedepankan silaturahmi. FKUB Kota Banjarmasin pertama kali dibentuk pada 2007 melalui majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

² Admin, "Profil Kota Banjarmasin," diakses 19 Januari 2024, <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>.

³ "BPS Kota Banjarmasin," diakses 19 Januari 2024, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>.

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang mana ketika awal berdiri, Drs. H Anang Mahfuz dari MUI Kota Banjarmasin menjadi ketua. Namun, setelah ia wafat, wakil ketua saat itu, Prof. Ma'ruf Abdullah menjadi ketua hingga Januari 2018 sampai beliau wafat. Sempat terjadi kekosongan jabatan ketua hingga Oktober 2018, Dr. H. Maskur, M.M. menjadi pjs atau pejabat sementara ketua sebelum akhirnya ia menjadi ketua resmi melalui Rapat Musyawarah Anggota FKUB Kota Banjarmasin pada Januari 2019.

Susunan struktur FKUB Kota Banjarmasin sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Dr. H. Maskur, M.M. | Ketua (Perwakilan Islam — Muhammadiyah Kota Banjarmasin) |
| 2 | Andrian Darmawan Phang, S.T. | Wakil Ketua I (Perwakilan Katolik — Keuskupan Kota Banjarmasin) |
| 3 | M. Rizali Yani, M.M. | Wakil Ketua II (Perwakilan Islam — Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 4 | H. M. Amrullah, S.T. | Sekretaris I (Perwakilan Islam — Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin) |

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 5 | Ir. Sutawijaya Kangmartono, S.T. | Sekretaris II (Perwakilan Budha — WALUBI Kota Banjarmasin) |
| 6 | H. Guruh Pandingan, S.E., M.M. | Bendahara (Perwakilan Islam — Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin) |
| 7 | H. Abu Zar Al Giffari, S.H.I., M.Ag. | Anggota (Perwakilan Islam — Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 8 | Mustafa Kamal | Anggota (Perwakilan Islam — Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 9 | Drs. H. Rusiansyah, M.Pd. | Anggota (Perwakilan Islam — Muhammadiyah Kota Banjarmasin) |
| 10 | M. Najmuel Muttaqin, S.Sos.I. | Anggota (Perwakilan Islam — Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin) |
| 11 | Zainul Erfan, S.S., M.Pd. | Anggota (Perwakilan Islam — Dewan Masjid |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 12 | Wayan Widana, S.H. | Anggota (Perwakilan Hindu — Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 13 | Dra. Bahrah, M.Pd.I. | Anggota (Perwakilan Islam — Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin) |
| 14 | Hj. Samihah, S.Ag. | Anggota (Perwakilan Islam — Aisyiyah Kota Banjarmasin) |
| 15 | Dahri Zulkifli | Anggota (Perwakilan Islam — Iman Tauhid Indonesia Kota Banjarmasin) |
| 16 | Drs. Ardenan | Anggota (Perwakilan Kristen — Gereja Kalimantan Evanjelis PGI Kota Banjarmasin) |
| 17 | Kusniadi Juhanah | Anggota (Perwakilan Kong Hu Chu — Tempat |

| | | |
|--|--|--|
| | | Ibadah Tri Dharma Kota Banjarmasin) |
|--|--|--|

Tabel 4.1 Matriks Pengurus FKUB Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

1. Informan 1⁴

Nama : Andrian Darmawan Phang, S.T.

Jabatan : Wakil Ketua I (Perwakilan Katolik — Keuskupan Kota Banjarmasin)

Usia : 48 Tahun

Alamat : Jl. Kaca Piring IV, Banjarmasin Tengah

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Politik yang dikaitkan dengan unsur agama, ini sangat berbahaya, terutama caleg, politik identitas bukan prioritas karena akan menjadi problem. Ini diharapkan tidak terjadi.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang?” Kemudian informan menjawab,

“Tergantung sudut pandang, agama hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan politik hubungan sesama manusia.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa

⁴ Andrian Darmawan Phang, Wakil Ketua I FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 November 2023 pukul 14.20 WITA di kediaman beliau di Jl. Kaca Piring IV, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampilkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

“Tentu itu sudah terlihat dari agama masing-masing, bahwa unsur agama memang melekat dari diri masing-masing, jadi tidak berhubungan dengan moderasi beragama. Cara pandang moderasi beragama memandang ke tengah dan jangan takut ikut berpolitik meskipun bukan mayoritas.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Menurut saya, dari pandangan Katolik, politik identitas sangat buruk karena tidak diharuskan, karena agama hubungan kepada Tuhan. Jadi, ini suatu kezaliman karena mengarah ke unsur kebencian.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Bisa terjadi karena kalau kita di kalangan tingkat atas, itu akan aman, tetapi di akar rumput, itu akan terjadi. Bahkan, dalam membangun rumah ibadah pun berbeda pandangan. Moderasi beragama yang digagas oleh Kemenag itu sangat bagus dan saya sangat dukung.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Harapan saya kepada kontestasi politik, jangan memulai dan mencari suara melalui politik identitas agama karena sebaiknya harus bersikap moderat, bersaing secara baik-baik.”

2. Informan 2⁵

Nama : Ir. Sutawijaya Kangmartono, S.T.

Jabatan : Sekretaris II (Perwakilan Budha — WALUBI Kota Banjarmasin)

Usia : 39 Tahun

Alamat : Jl. RK Ilir II, Banjarmasin Selatan

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Politik yang mengaitkan dengan agama tertentu, tidak netral.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang?” Kemudian informan menjawab,

“Seharusnya beriringan, tetapi pada nyatanya tidak terjadi. Padahal ketika dilantik, ia disumpah menggunakan kitab suci masing-masing agama.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampilkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

“Iya, banyak pemuka agama (contoh di Islam) yang menonjolkan itu untuk menjaring jemaahnya, sedangkan mungkin di agama lain jarang. Namun, selama pemuka agama maju di legislatif maupun eksekutif memiliki pemahaman tentang politik dan hukum, maka silakan.”

⁵ Sutawijaya Kangmartono, Sekretaris II FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 November 2023 pukul 11.50 WITA di Vihara Duta Prabha Jl. R.K Ilir, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

Keempat, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian, informan menjawab,

“FKUB sangat tidak mendukung, meskipun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wewenang kami. Sekarang banyak tokoh agama yang berbicara politik, sebaliknya tokoh politik berbicara tentang agama.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Peluang terpecah belah ada, jadi tergantung individu masing-masing, tergantung niat.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Menurut saya, kita harus netral, kita tetap di tengah, kita tidak memengaruhi orang lain agar tendensi tidak semakin muncul. Siapa pun yang terpilih, maka itulah kehendak Tuhan.”

3. Informan 3⁶

Nama : H. Guruh Pandingan, S.E., M.M.

Jabatan : Bendahara FKUB (Perwakilan Islam — Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin

Usia : 44 Tahun

⁶ Guruh Pandingan, Bendahara FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2024 pukul 10.08 WITA di Kantor Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan Jl. D.I Panjaitan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

Alamat : Jl. Soetoyo S., Banjarmasin Barat

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik, tetapi kaitannya dengan FKUB, maka politik identitas ini tidak berpengaruh lagi karena kita saling menghargai.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang? Kemudian informan menjawab,

“Jadi, agama dan politik seharusnya bisa saling beriringan. Politikus yang paham agama, maka ia tidak akan melakukan demikian. Sebaliknya politikus yang menggunakan simbol-simbol agama, maka ia akan terkotak-kotak sendiri. Sedangkan dalam ajaran agama kita diharuskan taat pada negara.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampakan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

“Itu ada 2 pandangan. Pertama, ia dikatakan eksklusif secara keagamaan karena ia tidak mau menerima perbedaan dengan agama lain. Kedua, bisa juga ia moderat, tetap menghargai agama lain meskipun tetap menonjolkan apa yang ia miliki dari agamanya dan toleransi.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Sebenarnya sikap FKUB, kita dari awal sudah membangun sikap toleransi. Jadi, ketika seseorang menggunakan identitas agama, maka itu kembali ke pribadi masing-masing. Sebab tidak semua yang beragama itu intoleransi. Ada juga yang menggunakan politik identitas, tetapi tetap toleransi kepada agama lain.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Bisa, selama ia berlaku intoleran. Selama ia intoleran, maka ia akan terus menggunakan politik identitas meskipun kita juga harus menyikapi bahwa itulah haknya.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Itu perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi, FKUB dan tokoh agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat tetap intoleran, itulah yang terjadi. Intinya, perbedaan tidak dapat dihindari, yang penting perbedaan tidak menjadikan pemisah antar umat beragama.”

4. Informan 4⁷

Nama : Drs. H. Rusiansyah, M.Pd.

Jabatan : Anggota (Perwakilan Islam — Muhammadiyah Kota Banjarmasin)

Usia : 61 Tahun

Alamat : Jl. Kelayan B Timur, Banjarmasin Selatan

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Individu maupun komunal yang terlalu menonjolkan kepribadian keagamaannya yang dibawa ke ranah politik. Sehingga kesannya menonjolkan agamanya saja. Sebab hal ini tidak sesuai dengan negara kita. Namun, sulit untuk menghilangkannya karena setiap orang memiliki identitas tersendiri.

⁷ Rusiansyah, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Oktober 2023 pukul 17.15 WITA di kediaman beliau Jl. Kelayan B Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

Poinnya adalah bagaimana dengan adanya identitas yang dimunculkan tetap bisa menghargai orang lain.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang? Kemudian informan menjawab, “Ada dua pemahaman, orang hanya memahami orang beragama hanya beribadah saja. Padahal, politik termasuk bagian agama juga. Menurut saya pribadi, kita harus paham politik mengingat agama mengatur politik seperti membuat peraturan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampilkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab, “Jika terlalu subjektif, maka dinilai tidak moderat. Jangan terlalu menonjolkan agama karena seharusnya menampilkan gagasan yang ingin ia bawa. Lebih bagus lagi adu gagasan. Jika ingin membawa agama dalam politik, maka bawa nilai kedamaian yang agama sampaikan ketika berpolitik.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab, “FKUB Kota Banjarmasin harus melakukan teguran melalui surat. Kami juga berencana ingin mengundang politikus, sebelumnya sudah pernah mengundang mahasiswa. Jadi, sisa kami koordinasikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab, “Tentu saja, apalagi terlalu subjektif memperlihatkan identitas agamanya. Terutama politikus tersebut bersikap konservatif, kurang moderat, bahkan sampai bersikap ekstrem. Jika demikian, maka sila ketiga Pancasila secara tidak langsung akan hilang.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Satu-satunya melalui terobosan yang akan FKUB Kota Banjarmasin lakukan, yaitu mengundang para politikus yang akan berkontestan. Terobosan ini dinilai baik, terutama pemerintah Kota Banjarmasin mendukung hal ini.”

5. Informan 5⁸

Nama : Drs. Ardenan

Jabatan : Anggota (Perwakilan Kristen — Gereja Kalimantan Evangelis PGI Kota Banjarmasin)

Usia : 74 Tahun

Alamat : Jl. Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Hal inti dari politik identitas agama ialah bagaimana mengambil suatu sikap dalam menonjolkan identitas agama ketika ingin melakukan kekuasaan, terutama ketika pemilu. Hal ini dilakukan seperti mengeluarkan massa maupun menggunakan atribut keagamaan. Namun, menurut saya, di Kalimantan Selatan, termasuk di Banjarmasin tidak terlalu menonjolkan..”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang? Kemudian informan menjawab,

⁸ Ardenan, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 November 2023 pukul 16.19 WITA di kediaman beliau Jl. Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

“Idealnya beriringan karena politik merupakan aktivitas yang memperjuangkan masyarakat, begitu juga dengan agama. Jadi, antara agama dan politik seharusnya sejalan. Sehingga sikap ekstrem seperti radikal harus dihilangkan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampakkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

“Untuk saat ini, saya belum bisa menilai karena belum mendapatkan informasi tentang caleg yang akan berkontestan.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Saya kira politik identitas agama nanti pada pemilu mendatang tidak akan muncul karena sering disinggung dalam forum-forum diskusi.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Kemungkinan tidak sampai memecah belah umat beragama, seperti di Banjarmasin karena sudah banyak sikap preventif yang dilakukan pemerintah. Pemerintah juga mem-*backup* untuk menghindari perpecahan, termasuk juga kami lakukan. Rapat juga akan kami lakukan secara berkala.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“FKUB Kota Banjarmasin melakukan langkah-langkah seperti melakukan rapat kerukunan antar agama. Apa pun yang dibahas, tujuannya memang menjaga

kerukunan umat beragama, termasuk dalam pembahasan pemilu. Kami juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti Poltabes, bahkan BIN.”

6. Informan 6⁹

Nama : Kusniadi Juhana

Jabatan : Anggota (Perwakilan Kong Hu Chu — Tempat Ibadah Tri Dharma Kota Banjarmasin)

Usia : 69 Tahun

Alamat : Jl. Kelapa Gading, Banjarmasin Timur

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Secara umum, masyarakat secara langsung sudah memiliki identitas. Jadi, semua orang memiliki identitas. Lebih spesifik, seperti dalam Konghucu, ada yin yang. Sebetulnya, semua agama ada identitas. Tapi, jangan dikonotasikan negatif. Jadi, identitas sebuah keharusan. Dua hal yang berada, politik identitas dihindari oleh cendekiawan, terutama sejak kejayaan pemilu 2019 karena ada yang menonjolkan identitas, padahal kita negara pluralisme sehingga tidak cocok. Jadi, berpolitik jangan menggunakan politik identitas.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang?” Kemudian informan menjawab,

“Jika orang berpolitik, artinya adu gagasan, ide, dan lain-lain, jangan disamakan dengan agama karena itu spiritual. Politik dalam arti demokrasi, sudah sesuai asas Pancasila yang bersifat inklusif. Nanti kita bisa menilai, siapa yang menggunakan agama dalam politiknya.”

⁹ Kusniadi Juhana, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 November 2023 pukul 14.32 WITA di Kelenteng Tri Dharma Soetji Nurani Jl. Kapten Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampilkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

“Tergantung, konstituen, di mana ia tampil. Pasti sangat terbatas, apakah ia mampu terpilih dengan suara yang cukup. Konstituen kita kan homogen. Jika menampilkan politik identitas, maka suara akan hilang. Jadi, sangat sempit jika menggunakan politik identitas karena hanya bertujuan kepada satu agama saja.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Itu di luar ranah kami karena kami berfokus pada kerukunan umat beragama.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Jika kita tidak hati-hati secara bersama-sama menanggulangi hal ini, bisa saja. Oleh karena itu, potensi ini berkembang, jangan sampai mengarah pada berbahaya. Jika ada, maka kita bisa lapor kepada aparat dan tokoh agama jika ada gerakan politik identitas agama. Hal ini bersama-sama dideteksi di akar rumput.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Kami sering berinteraksi di antara kami, juga diundang oleh organisasi lain maupun mahasiswa karena bisa saling mengenal.”

7. Informan 7¹⁰

Nama : Wayan Widana, S.H.

Jabatan : Anggota (Perwakilan Hindu — Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Banjarmasin)

Usia : 60 Tahun

Alamat : Jl. Meratus, Banjarmasin Tengah

Pertama, peneliti menanyakan tentang, “Apa yang Anda ketahui tentang politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Kami dari Hindu tidak setuju dengan politik identitas, sebaiknya dalam kontestasi politik ini tidak membawa simbol-simbol agama. Alasannya karena kita berlandaskan pada Pancasila, cukup menimbulkan simbol-simbol bangsa. Jadi, tidak perlu membawa berbau agama dan tidak setuju menonjolkan identitas agama.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang, “Apakah agama dan politik saling beriringan atau justru saling bertolak belakang?” Kemudian informan menjawab,

“Agama dan politik seharusnya beriringan karena keduanya punya peran masing-masing. Sebab politik akan menentukan kehidupan bangsa ke depannya.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang, “Apakah dengan menunjukkan identitas agama pada diri calon legislatif maupun eksekutif menandakan bahwa hal ini tidak menerapkan moderasi beragama karena hanya menampakkan dirinya eksklusif untuk agamanya sendiri?” Kemudian informan menjawab,

¹⁰ Wayan Widana, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 November 2023 pukul 09.37 WITA di Rattan Inn Lantai 1 Ruang Makan Jl. A. Yani KM. 5, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

“Sebenarnya para caleg tidak perlu lagi menunjukkan identitasnya karena masyarakat sudah paham dan tahu.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB melihat adanya unsur politik identitas yang sering dimunculkan dalam pemilu, terutama politik identitas agama?” Kemudian informan menjawab,

“Sebenarnya tidak diatur dalam UU, jadi sah-sah saja, seseorang dalam mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ia perwakilan dari suatu komunitas. Masyarakat kita sudah paham, jadi tidak perlu dipersoalkan.”

Kelima, peneliti menanyakan tentang, “Apakah FKUB memandang bahwa politik identitas agama dapat memecah belah persatuan umat beragama?” Kemudian informan menjawab,

“Iya, kalau berkaca pada 2019 kental dengan nuansa politik identitas. Kami mengharapkan tidak ada seperti itu lagi ke depannya karena dapat memecahkan agama, bahkan dalam sesama agama pun secara internal bisa pecah sendiri. Jadi, sebaiknya jangan ditonjolkan karena bagaimanapun politik identitas akan memecah belah bangsa.”

Terakhir, peneliti menanyakan tentang, “Bagaimana sikap FKUB selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama agar tendensi politik identitas agama tidak memecah belah persatuan umat?” Kemudian informan menjawab,

“Pak Walikota telah memberi masukan kepada kami bahwa kami harus mensosialisasikan kepada caleg-caleg agar tidak menonjolkan agama karena agama jangan dicampurkan keduanya, meskipun keduanya saling mendukung. Jadi, sebaiknya itu jangan digunakan.”

C. Analisis Data

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama pada Pemilu 2024

Sebelum masuk pada bagaimana penjelasan peran FKUB dalam Menanggulangi politik identitas agama, pendefinisian politik identitas sendiri pun bermacam-macam. Setidaknya jika kita melihat pemaparan yang dipaparkan oleh informan, pendefinisian politik identitas cukup beragam. Ada yang mengartikan bahwa politik identitas selalu erat kaitannya dengan agama dan bersifat bahaya terutama bagi calon anggota legislatif (caleg). Alasan ini muncul karena narasi yang dibangun tidak menampilkan prioritas yang akan dibawakan oleh caleg tersebut sehingga akan menimbulkan masalah.

Di lain sisi, politik identitas sudah jelas hanya mengaitkan dengan agama tertentu, hanya satu agama, tidak pada agama lain, sehingga nyata adanya ketidaknetralan. Adapun ciri-ciri utamanya ialah simbol-simbol keagamaan digunakan untuk kepentingan politik. Meskipun sebenarnya, FKUB memahami bahwa mereka tidak langsung terlibat dalam menangani politik sehingga secara terbuka menghargai penggunaan simbol-simbol agama pada politik.

Namun, definisi secara umum politik identitas agama menurut perwakilan FKUB Kota Banjarmasin ialah individu maupun komunal yang terlalu menonjolkan kepribaian keagamaannya yang dibawa ke ranah politik. Sehingga kesannya menonjolkan agamanya saja. Sebab hal ini tidak sesuai dengan negara kita. Namun, sulit untuk menghilangkannya karena setiap orang memiliki identitas tersendiri. Poinnya adalah bagaimana dengan adanya identitas yang dimunculkan tetap bisa menghargai orang lain. Sehingga dominasi agama justru dapat merusak citra politik akibat adanya politik

identitas. Pendapat lain, adapun yang dimaksud menonjolkan kepribadian agamanya ialah mengeluarkan massa (simpatisan dan pendukung) maupun menggunakan atribut keagamaan. Namun, pendapat perwakilan FKUB Kota Banjarmasin merasa apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarmasin tidak seperti di daerah lain, politik identitas di Kota Banjarmasin masih pada batasnya.

Mengingat juga bahwa secara umum, secara individu maupun komunal, identitas telah dimiliki masing-masing dan melekat tersendiri. Jadi, jika dikatakan adanya istilah ‘politik identitas’ itu hadir, tidak menjadi masalah karena segala sesuatu memiliki identitasnya. Namun, terkadang politik identitas dimaknai secara kurang baik, terutama bagi cendekiawan mengingat pada Pemilu 2019, identitas terlalu dimunculkan. Hal ini berdampak pada perpecahan persatuan yang mana Indonesia secara notabene merupakan negara plural sehingga politik identitas dinilai tidak cocok diterapkan.

Pada pandangan lain, perlu diingat bahwa politik identitas sering kali dimunculkan oleh mereka yang secara kuantitas unggul dari yang lain, baik agama, suku, ras, golongan, dan lainnya. Sehingga bagi mereka yang minoritas, perbuatan ini keluar dari Pancasila, terutama pada sila ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia.” Artinya, menampakkan identitas untuk kepentingan individu maupun komunal bagi yang melakukan, dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia dengan harapan agar hal ini dihindari.

Pendefinisian hingga pemaknaan dari segi etiket yang dijelaskan para informan, tidak jauh berbeda menurut Raju Das¹¹ bahwa fakta yang ada pada individu dan komunal yang menghasilkan politik identitas tidak lain sebagai bentuk pengakuan ataupun penghormatan. Sedangkan dari pendapat Cressida Heyes,¹² politik identitas memang ditujukan agar terbebas dari konstituen yang terpinggirkan. Tujuan utama adanya politik identitas tidak lain ialah demi mencapai kepentingan bersama dan menciptakan komunitas berdasarkan persamaan yang mana sebenarnya digambarkan seperti orang-orang terpinggirkan merangkul identitas yang sebelumnya terstigmatisasi (dicirikan negatif oleh masyarakat). Sehingga mereka yang membentuk politik identitas pada akhirnya bersatu mengambil hak mereka untuk pengakuan.

Namun, fakta di lapangan justru berbalik karena politik identitas agama tidak muncul dari mereka yang menginginkan pengakuan dari kelompok mayoritas karena justru kelompok mayoritaslah yang menciptakan politik identitas agama. Sebagaimana fakta empiris di lapangan ataupun *based on data*, politik identitas agama di Indonesia mayoritas dimunculkan pemeluk agama Islam ketika pemilu diadakan.

Sebagai contoh di Indonesia, Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 menampilkan politik identitas agama yang dilakukan oleh orang Islam. Hal ini muncul tidak lain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemeluk agama Protestan, mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta yang mana

¹¹ Das, "Identity Politics."

¹² "Friends of the SEP Society - Preview of Identity Politics PDF."

sebanyak 83,67% penduduk DKI Jakarta beragama Islam.¹³ Masyarakat menolak Ahok menjadi gubernur yang mana sebenarnya dilatarbelakangi kasus penistaan agama yang Ahok lakukan terhadap agama Islam.¹⁴ Meskipun politik identitas agama yang terjadi di Jakarta tidak dilakukan oleh lawan politik Ahok secara langsung, tetapi bagaimana politik identitas agama mampu memengaruhi banyak orang sehingga Ahok kalah di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 karena kalah dari Anies Baswedan yang memperoleh 57,95% suara.¹⁵

Jika secara umum pendefinisian politik identitas oleh FKUB Kota Banjarmasin yang diwakili oleh pengurusnya, maka mempertanyakan korelasi agama dan politik benar adanya atau justru bertolak belakang, FKUB Kota Banjarmasin memiliki jawaban yang unik. Mayoritas dari mereka menggunakan kata ‘tergantung’ dan ‘seharusnya’. Secara rinci, ‘tergantung’ sudut pandang, menurut informan Andrian, karena agama merupakan hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhan, sedangkan politik merupakan hubungan horizontal, antar sesama manusia. Jika ditarik kesimpulan pada kata ‘tergantung’, artinya secara subjektif, antara agama dan politik merupakan dua hal berbeda yang memiliki posisi masing-masing. Namun, jika dicermati, agama dapat menjadi sumber bagi berpolitik karena Tuhan melalui ajaran-Nya juga banyak memberikan firman-Nya; melalui ucapan, perbuatan, serta ketetapan utusannya, yaitu nabi; praktik orang-orang saleh terdahulu; dan lain-

¹³ “Satu Data - Kementerian Agama RI.”

¹⁴ Meia, “Apa itu Politik Identitas dan Contohnya.”

¹⁵ “KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017.”

lain dalam berpolitik. Sehingga dalam pandangan subjektif, agama dan politik dapat saling berkorelasi, saling mendukung yang mana artinya politik identitas agama tidak menjadi permasalahan.

Akan tetapi, pendapat mayoritas justru memberikan pengharusan dengan kata 'seharusnya' atau dengan frasa 'seharusnya beriringan'. Pengharusan artinya mewajibkan, mewajibkan antara agama dan politik harus beriringan. Sayangnya, dengan adanya frasa 'seharusnya beriringan' itu yang mengartikan bahwa agama dan politik di Indonesia dinilai bertolak belakang. Alasan ini tidak lain karena penggunaan politik identitas agama yang dirasa tidak tepat karena menjadikan agama sebagai alat politik.

Infroman Sutarwijaya¹⁶ bahkan sampai menyayangkan bagi mereka yang menggunakan politik identitas agama hanya untuk kepentingan tersendiri karena ketika seseorang politikus dilantik menjadi pejabat melalui kontestasi politik, ada sumpah jabatan menggunakan kitab suci. Pengharusan yang dimaksud informan Sutarwijaya ialah pejabat tersebut tidak boleh lagi terbawa arus politik identitas agama ketika sudah menjabat karena kepentingan yang dibangun untuk masyarakat secara luas tanpa memandang agama. Sehingga dapat dimaknai bahwa penggunaan politik identitas agama yang terlalu melekat akan menimbulkan ketidakadilan.

¹⁶ Sutarwijaya Kangmartono, Sekretaris II FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 November 2023 pukul 11.50 WITA di Vihara Duta Prabha Jl. R.K Ilir, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

Pendapat lain diberikan oleh informan Guruh¹⁷ bahwa antara agama dan politik memang seharusnya beriringan. Namun, informan Guruh justru mengisyaratkan agar politik identitas agama dihindari. Alasan yang diberikan ialah agar tidak terjadi batasan atau pengkotakan tersendiri antar agama. Menurutnya, politikus yang paham agama dengan baik, tidak akan memanfaatkan politik identitas agama untuk mendapatkan simpati masyarakat. Adapun pendapatnya ini didasari oleh ketaatan terhadap negara atau nilai-nilai, dasar-dasar, ataupun cita-cita negara, salah satunya ialah menjaga persatuan, yang mana dalam agama juga diajarkan. Sehingga bagi politikus yang memanfaatkan politik identitas agama sama saja diartikan memberi jarak antara agama dan politik serta dapat memecah persatuan.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat lain dari informan Kusniadi bahwa politik di Indonesia memang seharusnya sesuai asas Pancasila yang bersifat inklusif, tidak eksklusif. Terbuka untuk semua kalangan tanpa melihat perbedaan selama masyarakat tersebut memang memiliki hak dalam artian merupakan orang yang berada di wilayah yang dikuasai, maka hal yang menimbulkan perpecahan harus dihindari. Oleh karena itu, ada gagasan menjadi jalan yang harus ditempuh politikus jika ingin berkontestan dan tidak semata memanfaatkan politik identitas agama. Sehingga masyarakat dapat menilai sendiri dari dua cara, apa gagasan dan ide yang ditawarkan oleh politikus serta

¹⁷ Guruh Pandingan, Bendahara FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2024 pukul 10.08 WITA di Kantor Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan Jl. D.I Panjaitan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

adakah politikus tersebut memanfaatkan politik identitas agama untuk kepentingannya.

Sedangkan, menurut informan Rusiansyah,¹⁸ penilaian ini harus dilihat dari dua pemahaman. Pertama, orang hanya memahami orang beragama hanya beribadah saja. Kedua, padahal, politik termasuk bagian agama juga. Menurutnya, masyarakat seharusnya paham bahwa politik juga diatur oleh agama sehingga pendapat kedua ini yang seharusnya selalu diingat oleh masyarakat. Dengan demikian, agama dan politik memang beriringan. Informan Ardenan menambahkan, jika ditinjau lebih jauh dan dirasa secara mendalam, maka agama dan politik sebagaimana idealnya harus beriringan, akan menghindari sikap ekstrem dalam kehidupan bernegara.

Selanjutnya, pendapat dari informan Wayan¹⁹ menyebutkan bahwa sudah seharusnya antara agama dan politik beriringan karena keduanya memiliki peran masing-masing. Kembali pada penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa korelasi antara agama dan politik harus kuat karena nilai-nilai politik dalam agama dapat menentukan kehidupan negara ke depan. Dengan demikian, sudah sangat jelas antara agama dan politik saling mendukung. Agama menyediakan nas suci ataupun kejadian pada masa lalu,

¹⁸ Rusiansyah, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Oktober 2023 pukul 17.15 WITA di kediaman beliau Jl. Kelayan B Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

¹⁹ Wayan Widana, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 November 2023 pukul 09.37 WITA di Rattan Inn Lantai 1 Ruang Makan Jl. A. Yani KM. 5, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin

kemudian nilai-nilai tersebut diterapkan dalam berpolitik. Sehingga pada porsinya, agama menjaga politik agar tidak keluar batas.

Maka itulah cara pandang berpolitik yang direlasikan dengan agama karena menurut Raymond Firth,²⁰ keduanya bersifat kompleks dan paradoks. Sebab sebenarnya antara keduanya sama-sama memiliki kekuatan masing-masing karena adanya perbedaan fundamental antara politik dan agama.

Adapun kesimpulan FKUB Kota Banjarmasin tentang apakah agama dan politik saling berkorelasi atau bertolak belakang, menghasilkan jawaban bahwa keduanya sudah seharusnya demikian. Pemanfaatan politik identitas agama pun demikian dengan cara tidak menampaknya secara dominan karena kembali lagi bahwa agama menjadi pembatas. Tidak ada maksud melarang politik identitas agama, tetapi lebih memperhatikan lebih ketat.

Hal selanjutnya yang juga perlu dipertanyakan, jika politik identitas agama digunakan yang mengartikan politikus tersebut hanya merepresentasikan politik sesuai agamanya, apakah dinilai tidak menerapkan moderasi beragama atau intoleran? FKUB Kota Banjarmasin memiliki jawaban berbeda-beda. Sebagaimana menurut informan Andrian,²¹ tidak ada hubungannya menggunakan politik identitas agama dengan sikap tidak moderat. Sebab secara implisit, masyarakat pada umumnya sudah dapat menilai yang mana saja politikus yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hinda, dan

²⁰ Firth, "Spiritual Aroma...", hlm. 583.

²¹ Andrian Darmawan Phang, Wakil Ketua I FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 November 2023 pukul 14.20 WITA di kediaman beliau di Jl. Kaca Piring IV, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin

Konghuchu karena adanya identitas yang melekat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap moderat atau tidak, tampaknya tidak berpengaruh. Informan Andrian justru menginginkan politikus dari agama minoritas agar tetap berkontestan karena itu akan menjadi penyeimbang dan menjawab sikap moderat.

Namun, hanya saja menurut penuturan informan Sutawijaya, contoh di agama Islam, tidak hanya politikus yang menggunakan politik identitas agama, tetapi juga dilakukan oleh pemuka agama dengan tujuan mencari suara jemaah. Pemuka agama dianggap mempunyai pengaruh kuat sehingga dimanfaatkan dalam berpolitik. Menurut informan Sutawijaya, mungkin hanya politikus beragama Islam saja yang melakukan demikian yang mana tidak lepas dari faktor agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Namun, selama pemuka agama ingin terjun ke dunia politik, maka juga harus memahami permasalahan politik dan hukum. Hal ini dimaksudkan agar pemuka agama jika ingin menjadi politikus tidak menjadi pelaku politik identitas agama yang mana sudah jelas tujuannya mengarah pada pencarian suara dari jemaah.

Pandangan berbeda dijelaskan oleh informan Guruh. Menurutnya, jika ingin menilai apakah melakukan politik identitas agama termasuk tidak moderat maupun intoleran, harus dilihat dari dua pandangan. Pertama, politik identitas agama akan menjadi eksklusif sehingga tidak moderat dan intoleran, ditambah praktik politik hanya melihat dari agamanya saja tanpa menerima perbedaan dengan agama lain. Kedua, politik identitas agama bisa menjadi inklusif, menghargai agama lain di tengah kemajemukan kehidupan masyarakat

bernegara. Akan tetapi, dominasi tetap diperlihatkan sebagai pelaku politik identitas agama karena berasal dari agama mayoritas.

Pendapat informan Guruh diamini oleh informan Kusniadi²² yang menyatakan bahwa moderat atau tolerannya pelaku politik identitas agama tergantung konstituen di mana ia tampil. Menurut informan Kusniadi, dengan adanya homogenitas di Indonesia, maka sudah seharusnya politik identitas agama tidak berpengaruh di masyarakat. Dengan begitu, penggunaan politik identitas agama akan terasa sempit dari pandangan masyarakat karena hanya ditujukan pada satu agama saja.

Begitupula dengan pendapat informan Rusiansyah yang menyatakan bahwa politik identitas agama bisa saja tidak moderat jika dilakukan terlalu subjektif. Sehingga jika ingin dihindari, maka lebih baik berkontestasi dengan menampilkan gagasan yang ingin dibawa. Namun, informan Ardenan merasa perlu menunggu siapa saja politikus yang akan maju di Pemilu 2024 sehingga belum bisa menilai.

Informan Wayan terakhir berpendapat bahwa pengaruh moderat maupun tolerannya politikus dalam menggunakan politik identitas diabaikan saja karena masyarakat sudah dapat menilai sendiri dan mengetahui yang mana saja yang menggunakan politik identitas agama atau tidak karena sekali lagi, identitas sudah melekat pada setiap individu maupun komunal. Menurut hemat

²² Kusniadi Juhana, Anggota FKUB Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 November 2023 pukul 14.32 WITA di Kelenteng Tri Dharma Soetji Nurani Jl. Kapten Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

peneliti, keseluruhan pendapat informan di atas mengartikan bahwa sebenarnya melakukan politik identitas agama merupakan hal yang tidak menjunjung moderasi beragama dan juga intoleransi. Menonjolkan satu agama dalam berpolitik jelas menjadi masalah. Namun, semua ini dikembalikan lagi kepada masyarakat yang dinilai sudah paham pola politik identitas agama yang dilakukan oleh sebagian politikus.

Pertanyaan selanjutnya pun muncul, FKUB Kota Banjarmasin selaku organisasi yang menaungi kerukunan umat beragama memiliki penilaian seperti apa terhadap adanya politik identitas agama yang terjadi di Kota Banjarmasin. Hal ini sekaligus melihat peran FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama. Maka informan Andrian menjawab bahwa selaku perwakilan agama Katolik, ia menilai politik identitas agama merupakan hal yang sangat buruk karena seharusnya dihindari. Hal ini sama saja dapat mengurangi eksistensi hubungan kepada Tuhan karena politik yang dianggap abu-abu. Selain itu, ada banyak kezaliman dan kebencian jika agama dan politik terlalu dicampur dan tidak diimbangi sesuai posisi masing-masing.

Adapun sudah jelas menurut informan Sutawijaya, FKUB Kota Banjarmasin sangat tidak mendukung tindakan politik identitas agama yang berujung merugikan banyak pihak. Namun, berbicara peran FKUB Kota Banjarmasin secara keseluruhan, FKUB Kota Banjarmasin tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak termasuk wewenang mereka. Hal ini juga diperparah adanya banyak orang yang tertukar peran seperti banyak tokoh agama yang berbicara politik, sebaliknya tokoh politik berbicara tentang agama.

Faktor kurang masuknya peran FKUB Kota Banjarmasin dalam permasalahan ini dapat dilihat dari pendapat Crystal L. Hoyt, Terry L. Price, dan Laura Poatsy,²³ yang menyebutkan bahwa peran sosial tergantung situasi karena justru pemerintah sendiri yang melakukan politik identitas agama dan menampakan kepentingan tersendiri akibat adanya polarisasi politik. Mengingat juga bahwa FKUB Kota Banjarmasin secara koordinasi di bawah naungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Jika secara khusus mengenai peran yang mengarah pada sikap politik tidak dapat dilakukan FKUB Kota Banjarmasin, maka informan Guruh melengkapi jawaban informan Andrian di atas bahwa yang perlu digarisbawahi dari adanya permasalahan ini, FKUB Kota Banjarmasin mengambil langkah pada sikap membangun toleransinya. Dengan demikian, perbedaan pendapat yang dilakukan oleh FKUB Kota Banjarmasin tidak menjadi masalah. Sebab sesuai penjelasan Eliana Sari²⁴ tentang karakteristik organisasi, FKUB Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan karakteristik organisasi yang ada, yaitu tujuan bersama, pembagian tugas, hierarki wewenang, dan koordinasi, sebagainya konsep ini digagas oleh Eliana Sari.

Tujuan bersamanya ialah membangun sikap toleransi kepada seluruh umat beragama, termasuk ketika berkontestasi politik. Pembagian tugas dimaksud, hierarki wewenang, dan sekaligus koordinasi secara umum

²³ Crystal L. Hoyt, Terry L. Price, dan Laura Poatsy, "The Social Role Theory of Unethical Leadership," *The Leadership Quarterly* 24, no. 5 (1 Oktober 2013): 5, <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.07.001>.

²⁴ Sari, *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*, 5–7.

dilakukan oleh pihak lain seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga lain yang secara khusus berfokus pada politiknya. Sehingga FKUB Kota Banjarmasin hanya melihat bagaimana menjaga kerukunan umat beragama. Terlebih tidak ada aturan yang melarang politikus menggunakan politik identitas agama sehingga ini merupakan hak masing-masing. Oleh karena itu, hal ini dikembalikan juga kepada politikus untuk membatasi diri terhadap penggunaan politik identitas demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

Pendapat di atas juga ditambahkan oleh informan Kusniadi yang menyebutkan bahwa sudah jelas permasalahan penggunaan politik identitas agama tentang kebolehan maupun pelarangan, merupakan di luar wewenang mereka yang sudah jelas lebih berfokus pada kerukunan umat beragama.

Akan tetapi, secara tegas informan Rusiansyah menilai FKUB Kota Banjarmasin akan melakukan upaya seperti menegur politikus yang menimbulkan perpecahan umat beragama melalui surat. Di sisi lain, informan Ardenan menilai bahwa hal itu tidak akan terjadi karena forum-forum persatuan kebangsaan sering dilakukan.

Terakhir, informan Wayan memperjelas ulang atas pendapat-pendapat anggota FKUB Kota Banjarmasin di atas bahwa selama politik identitas agama tidak secara jelas iatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak menjadi masalah. Hanya saja, ini merupakan persoalan etiket (etika) dalam kehidupan bernegara karena harus saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai terjadi perpecahan akibat perbedaan sikap politik, terutama politik yang didominasi oleh agama tertentu. Selain peran utama dalam menjaga kerukunan

umat beragama, menurut informan Wayan, FKUB Kota Banjarmasin pernah melakukan sosialisasi tentang menjaga kerukunan beragama menjelang pemilu. Sebab pemilu dianggap krusial dan rawan terjadi perpecahan. Adapun hasilnya, masyarakat sudah paham tentang alur politik identitas agama sehingga tidak menjadi suatu hal yang perlu dipersoalkan lebih besar.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa peran FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama tidak langsung mengarah pada aspek politik karena mereka berpendapat bahwa hal itu memang di luar ranah mereka. Upaya yang mereka ambil sudah tepat, yaitu menjaga sikap perdamaian dan kerukunan dengan tetap membiarkan politik identitas agama dilakukan karena bagaimanapun, politik identitas agama secara hukum tidak terlarang. Sehingga FKUB Kota Banjarmasin menjadi penyeimbang agar tidak terjadi perpecahan. Adapun langkah nyata yang mereka lakukan ialah melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama kepada masyarakat, terutama menjelang pemilu.

2. Masalah dan Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama Menjelang Pemilu 2024

Meskipun telah dijelaskan pada analisis di atas tentang peran FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama, tetapi perlu dilihat lebih rinci tentang strategi yang mereka lakukan. Sebelum masuk pada bagian tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah penggunaan politik identitas agama berpotensi memecah belah persatuan umat beragama sehingga

jawaban tentang strategi yang dilakukan akan didapatkan. Semua informan sepakat memberikan jawaban bahwa penggunaan politik identitas agama memang membuat perpecahan persatuan umat beragama. Sehingga di sini muncul masalah karena adanya ancaman perpecahan dan persatuan umat beragama. Sebagaimana menurut informan Andrian, hal ini bisa terjadi pada orang awam atau biasa disebut akar rumput (*grassroot*). Di sisi lain, bagi mereka yang paham politik, melihat penggunaan politik identitas agama bisa diidentifikasi dan jarang tersulut perpecahan. Sehingga langkah yang diambil ialah harusnya bersikap moderat, melihat sesuatu dengan objektif, terutama agama dan politik merupakan hal yang sensitif. Program Kemenag berupa ‘moderasi beragama’ sudah tepat dan menurut pendapat pribadi informan Andrian, program tersebut didukungnya secara penuh. Secara tidak langsung, pemerintah memang mendukung dan menyediakan segala sesuatu yang bersifat menjaga persatuan.

Pendapat lain dari informan seperti informan Sutawijaya dan Guruh menilai, perpecahan akan terjadi jika pelaku politik identitas agama memang berniat mendominasi politiknya dengan politik identitas agama. Sehingga hal tersebut dinilai sebagai bentuk intoleran. Lagi-lagi hal yang dapat membenturkannya ialah karena penggunaan politik identitas agama merupakan hak yang secara bebas boleh digunakan oleh siapa saja.

Menurut informan Rusiansyah, politik identitas agama merupakan perkara subjektivitas, terutama bagi politikus berpaham agama konservatif,

kurang moderat, bahkan sampai bersikap ekstrem. Jika demikian terjadi, tidak memungkinkan implementasi sila ketiga Pancasila akan hilang.

Namun, informan Adenan berpendapat, kemungkinan yang ada di Banjarmasin tidak sampai memecah belah umat beragama karena sudah banyak sikap preventif yang dilakukan pemerintah. Pemerintah juga mem-*backup* untuk menghindari perpecahan dan FKUB Kota Banjarmasin juga sering melakukan rapat dengan pemerintah Kota Banjarmasin

Adapun informan Kusniadi juga memperingatkan bahwa sebaiknya iantisipasi saja pelaku politik identitas agama yang bertujuan memecah belah persatuan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu celah yang dapat membawa pada ranah hukum dalam artian dampak yang dihasilkan merupakan perpecahan persatuan umat beragama. Sedangkan informan Wayan teringat kasus pemilu 2019 yang mana suasana politik identitas agama tidak dapat dihindari. Sehingga harapan-harapan besar muncul yang mana dampak yang terjadi jangan sampai memecah belah antar umat beragama, bahkan dalam satu agama sendiri, terjadi perpecahan internal akibat berbeda pandangan politik. Sehingga informan Wayan tetap pada sikap bahwa politik identitas agama akan memecah belah persatuan umat beragama di Indonesia. Sehingga di sini, FKUB Kota Banjarmasin harus mengingat kendala organisasi, sebagaimana penjelasan Menurut Francis dan Woodcock²⁵ bahwa salah satu masalah yang ada ialah

²⁵ Mike Woodcock dan Dave Francis, *Unblocking Your Organization. A Revised and Expanded Edition of People at Work: A Practical Guide to Organizational Change* (California: University Associates, 1994).

kurang lancarnya komunikasi, sehingga di sini harus dihindari dan memperbaiki komunikasi.

Jawaban-jawaban di atas memberikan beberapa strategi yang secara langsung juga menjawab masalah yang ada dan akan dilakukan oleh FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama. Adapun sikap tegas dan strategi FKUB Kota Banjarmasin dalam menghadapi masalah, pertama, melalui jawaban informan Andrian mengimbau kepada politikus yang terjun dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif tidak mencari suara melalui politik identitas agama karena hal demikian dapat mengikis sikap moderat. Sehingga jalan yang ditempuh harus selain menggunakan politik identitas agama karena dinilai lebih baik dalam persaingan politik. Kedua, melalui jawaban informan Sutawijaya, sikap netral serta objektivitas harus dilakukan masyarakat selaku pemilih nanti. Hal ini demi menjaga diri agar tidak mudah dipengaruhi oleh mereka yang memiliki kepentingan politik. Dengan demikian, tendensi politik dapat diredam sambil berlapang dada bagi siapa saja yang terpilih di pemilu karena telah digariskan Tuhan.

Terakhir, menurut informan Guruh, Kusniadi, Rusiansyah, Adenan, dan Wayan strategi yang dilakukan juga diperlukannya pendidikan politik serta sosialisasi yang tepat, baik ditujukan kepada masyarakat, termasuk mahasiswa maupun politikus itu sendiri. Harapan dan gagasan ini diinginkan oleh FKUB Kota Banjarmasin yang mana nantinya dari FKUB Kota Banjarmasin serta tokoh agama berkolaborasi menjadi pemateri sekaligus mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam berpolitik. Hal ini tidak lepas dari pengakuan

informan Wayan bahwa rencana tersebut atas saran wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina, terutama ditujukan kepada politikus agar jangan menonjolkan agama ketika pemilu berlangsung atau secara implisit, wali kota Banjarmasin berharap tidak adanya politik identitas agama. Jika mengacu pada salah satu asas pemilu, yaitu asas bebas yang memiliki arti “setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.” Meskipun jika dilihat saat ini, masih ada masyarakat yang juga terbawa arus menjadi intoleran akibat berbeda pandangan politik. Namun, hal terpenting tetap menjadikan perbedaan pandangan politik tersebut menjadi kesenjangan dalam beragama di masyarakat. Jawaban tambahan dari informan Adenan mengatakan bahwa pihak FKUB Kota Banjarmasin telah bekerja sama dengan Polresta Banjarmasin serta BIN (Badan Intelijen Negara) setempat.

Menurut hemat peneliti, strategi yang telah dan akan dilakukan oleh FKUB Kota Banjarmasin sangat bagus diterapkan. Hanya saja, yang menjadi masalah tersendiri ke depannya, bagaimana FKUB Kota Banjarmasin memahamkan program pendidikan politik dan sosialisasinya secara tepat kepada masyarakat, terutama akar rumput. Selain itu, juga perlu adanya koordinasi dengan pihak yang bersangkutan seperti KPU dan Bawaslu. Sebab hal ini sesuai penjelasan Hax dan Majluf dalam J. Salusu²⁶, strategi harus melibatkan hierarki dan organisasi.

²⁶ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik* (Jakarta: PT Grasindo, 1996), hlm. 71–73.

Namun, sebagai yang dijelaskan Denny Iswanto dan Dewi Bayu Pamungkas,²⁷ apa yang akan dilakukan oleh FKUB Kota Banjarmasin akan terlihat dalam partisipasi politik nanti. Sebab parameternya ialah semakin tinggi menunjukkan masyarakat mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan pemerintahan, maka partisipasi politiknya tinggi. Namun, jika sebaliknya, rendahnya partisipasi dalam politik biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli terhadap urusan dan kegiatan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik warga tercermin dari sikap golongan putih (golput) dalam pemilu yang tentunya akan menjadi masalah baru ke depannya.

²⁷ Iswanto dan Pamungkas, "Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024," hlm. 17.